



**Identitas dan Kebijakan Luar Negeri:
Komitmen Jepang Terhadap Penanganan *Illegal Logging* di Indonesia dalam
Kerangka *Asia Forest Partnership*
Tahun 2002 - 2012**

Afifah Rahmi Andini

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Illegal logging in Indonesia has contributed to the increasing rate of deforestation and forest degradation at the global level as it is also responsible for the increase of world carbon emissions. Considering that problem, Japan present to initiate the Asia Forest Partnership (AFP) in 2002 to combat illegal logging in Indonesia. This research aimed to find the background of Japan's commitment to the relief initiative to decrease illegal logging in Indonesia. In analyzing the background, this research uses Constructivism Paradigm by employing qualitative method with explanative type-analytical techniques through interviews and literatures review. From this research, it can be known that the Japanese action in relation to its commitment to reduce illegal logging in Indonesia is strongly related to the identity of Japan as a eco-centric country with high concern for the environment, as a result of the adoption of Shinto's values.

Keywords: *Japan, Indonesia, illegal logging, Constructivism, ecocentric identity, Shinto, Asia Forest Partnership*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara terbesar ketiga yang mempunyai hutan tropis terluas di dunia dan memiliki peringkat pertama di Asia Pasifik, dengan jumlah luas hutan mencapai 133,6 juta hektar (*Forest Watch Indonesia*, 2011). Dari kekayaan hutan tersebut, Indonesia dipandang dunia sebagai salah satu negara yang berfungsi sebagai paru-paru dunia dan dianggap cukup signifikan dalam mempengaruhi perubahan iklim dunia. Namun, ironisnya Indonesia juga menjadi negara penyumbang polusi terbesar ketiga di dunia setelah Amerika dan Tiongkok melalui kejadian kehilangan hutan atau deforestasi (www.greenpeace.org). Penyebab intra-sektoral utama terjadinya deforestasi adalah *illegal logging*. Sebagai salah satu negara eksportir kayu tropis terbesar di dunia, *illegal logging* terjadi secara luas dan sistematis di banyak wilayah Indonesia. Hasil penelitian yang dikeluarkan oleh lembaga pengkajian yang berpusat di London, Chatham House, pada rentang waktu tahun 2000 hingga 2012 mencatat bahwa 70 persen produk kayu yang diekspor seperti *furniture*, kertas dan *pulp* atau bubur kayu di Indonesia masih dihasilkan dari penebangan ilegal (Lawson, 2014). Dengan pasar tujuan terbesar yaitu Jepang, Tiongkok, Eropa dan Korea Selatan (Lawson, 2014).

Jepang sebagai salah satu negara pengimpor kayu terbesar di dunia mempunyai permasalahan, yaitu produknya ditengarai sebagian besar menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu ilegal, sehingga merasa perlu untuk mengatasi permasalahan masuknya kayu ilegal ke negaranya tersebut (www.jatan.org). Pada Maret 2002, di sela-sela

pertemuan ketiga *Preparatory Committee World Summit on Sustainable Development* (WSSD) di New York, Ketua Delegasi Jepang, Seiji Morimoto menemui Ketua Delegasi Indonesia Emil Salim, untuk menyampaikan usulan kerjasama dalam bentuk partnership di bidang *illegal logging* (www.menlh.go.id). Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, Jepang merealisasikan keinginannya untuk mengatasi permasalahan seputar *illegal logging* dengan cara melakukan pertemuan dengan Indonesia pada April 2002 di Jakarta, Indonesia. Duta Besar Jepang, Kazuwo Asakai melakukan kunjungan ke Indonesia dan mengajukan kesepakatan untuk membentuk kerangka inisiatif dalam rangka mempromosikan *Sustainable Forest Management* (SFM) di Asia, yang kemudian dinamai *Asia Forest Partnership* (AFP) (www.menlh.go.id).

Dalam komitmennya melakukan kerjasama di bawah skema AFP, peran yang telah dilakukan oleh Jepang terhadap Indonesia antara lain: (1) Inisiator pembentukan AFP yang bekerjasama dalam memberantas *illegal logging*. (2) Pendonor dana yang memberikan insentif sebesar US\$ 720.000 untuk untuk pengadaan sertifikasi serta pengembangan legalitas standar nasional (Bambang, 2012: 268-272). (3) Fasilitator untuk memberikan asistensi kepada Indonesia untuk pembangunan kapasitas standar legalitas dan teknologi sistem pelacakan kayu (*Japan Forestry Agency*, 2010). (4) Membuat kebijakan domestik guna membatasi aliran kayu ilegal ke pasar Jepang, yang disebut *Green Konyuhoo* (www.goho-wood.jp).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komitmen Jepang dalam inisiatifnya untuk membantu mengatasi permasalahan *illegal logging* di Indonesia. Untuk menjawab tujuan tersebut penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis. Di dalam paradigma konstruktivis, terdapat dua pembahasan umum. Yakni konsep identitas dan norma. Pertama, dalam penelitian ini, konstruktivisme mencoba menjelaskan hubungan antara identitas dengan pengambilan kebijakan sebuah negara. Identitas adalah merupakan atribut atau karakteristik yang melekat pada diri aktor yang berfungsi untuk membedakan atau mengidentifikasi diri dengan pihak lain (Rosyidin, 2015: 47). Identitas tersebut kemudian membentuk kepentingan, sedangkan kepentingan akan membentuk tindakan seorang aktor. Sesuai fungsi konstitutif norma, bahwa identitas tidak semata-mata ada dengan sendirinya melainkan norma berperan dalam membentuk identitas dan kepentingan aktor (Rosyidin, 2015: 76).

Berdasarkan perspektif konstruktivisme tersebut tulisan ini berpendapat bahwa komitmen Jepang untuk menjalin kerjasama penanganan *illegal logging* dengan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari identitas Jepang sebagai negara ekosentrisme yang memiliki nilai kepedulian terhadap lingkungan hidup yang dilatar belakangi oleh kepatuhan terhadap pengadopsian norma domestik yakni Kepercayaan Shinto.

Pembahasan

Komitmen Jepang tersebut terbentuk karena adanya sebuah pondasi yang mendasarinya, yaitu identitas. Sesuai fungsi konstitutif norma, bahwa identitas tidak semata-mata ada dengan sendirinya melainkan norma berperan dalam membentuk identitas dan kepentingan aktor (Rosyidin, 2015: 90). Identitas tersebut kemudian membentuk kepentingan sehingga menjadi dasar penentu bagi Jepang dalam menghadapi isu lingkungan hidup internasional, khususnya permasalahan *illegal logging* di Indonesia.

Norma domestik yang mempengaruhi terbentuknya identitas Jepang yang dapat dijadikan acuan dalam menganalisis komitmen kerjasama Jepang dalam mengatasi permasalahan *illegal logging* di Indonesia adalah Kepercayaan Shinto. Shinto merupakan kepercayaan asli atau tradisional Jepang, yang kemudian sejak masa Restorasi Meiji (1868 – 1912) dikatakan sebagai agama resmi Jepang (Shaw, 2005: 9).

Kepercayaan Shinto mengajarkan bahwa manusia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari alam, semua terlihat memiliki hubungan satu sama lain dalam jaring saling ketergantungan baik ruang dan waktu ataupun hukum sebab akibat (Shaw, 2005:21). Ajaran ini terlihat dari salah satu unsur kepercayaan Shinto yaitu, menyembah alam (*nature worship*). Kepercayaan ini meyakini bahwasanya semua benda baik yang hidup maupun yang mati dianggap memiliki ruh atau spirit. Semua ruh (*kami*) tersebut dianggap memiliki daya kekuasaan yang berpengaruh terhadap kehidupan mereka. *Kami* merupakan personifikasi dari gejala-gejala alam yang dianggap mampu mendengar, melihat dan sebagainya sehingga harus dipuja secara langsung (Rots, 2015:141).

Berdasarkan pandangan Shinto, masyarakat Jepang melihat alam (*shizen*) dan *kami* sebagai suatu kesatuan, karena dalam kepercayaan Shinto, *kami* mempunyai tempat tersendiri di setiap tempat di setiap objek dan fenomena alam seperti pohon, hutan, gunung, laut, matahari, angin, bebatuan, bunga dan lain-lain. Keberadaan *kami* diyakini akan memberikan kesejahteraan hidup namun juga dapat mencelakakan. Maka dari itu, terbentuklah kepercayaan akan alam sebagai manifestasi dewa dan oleh karena itu dianggap sebagai objek sakral (Shaw, 2005:30).

Menimbang hubungan antara kepercayaan, objek sakral dan lingkungan hidup, memberikan penilaian terhadap Shinto sebagai sebuah tradisi yang bersifat ekosentrisme dengan melibatkan pemujaan terhadap alam. Shinto merupakan salah satu kepercayaan yang menggambarkan bahwa pemujaan mereka terefleksikan pada unsur-unsur alam.

Kedekatan antara Shinto dengan alam telah menciptakan tradisi mencintai lingkungan hidup dan *sustainable attitude* dalam masyarakat Jepang. Pengadopsian kepercayaan Shinto yang memanasifestasikan *kami* telah berkembang menjadi sikap ekosentrisme (Rots, 2013:156). Dimulai dari tingkat individu yang kemudian merambah menjadi *scope* yang lebih luas, yakni sistem dalam pemerintahan.

Karakter ekosentris yang melekat dalam masyarakat Jepang sebagai pengaruh dari adanya kepatuhan terhadap norma domestik, yakni kepercayaan Shinto. Berangkat dari kepercayaan yang mengakar dalam masyarakat Jepang, kemudian membentuk rasa kepedulian yang tinggi terhadap isu lingkungan telah berpengaruh terhadap pembentukan identitas Jepang sebagai negara ekosentris. Adanya identitas ekosentris tersebut kemudian telah mempengaruhi fokus pemerintah terhadap isu lingkungan. Kebijakan Jepang tidak pernah terlepas dari lingkungan hidup. Pemerintah Jepang selalu memasukkan pertimbangan lingkungan hidup sebagai dasar pembuatan kebijakan.

Identitas Jepang sebagai negara ekosentris telah membentuk sikap *responsibility* Jepang terhadap perlindungan lingkungan hidup global. Sikap ini timbul dikarenakan adanya anggapan bahwa apabila permasalahan lingkungan tidak segera diatasi, akan menimbulkan ancaman di kemudian hari. Maka dari itu, Jepang meletakkan isu lingkungan hidup sebagai prioritas teratas dalam kebijakan luar negerinya seperti yang tercantum dalam *1998 Japan Diplomatic Bluebook* (www.mofa.go.jp). Sejalan dengan komitmen tersebut, Jepang berupaya menjadi pemimpin dalam mengatasi permasalahan lingkungan global dengan melakukan strategi diplomasi pro-aktif terhadap negara-negara lain. Salah satu bentuk implementasi komitmen tersebut adalah mengadakan pendampingan dan kerjasama terhadap negara berkembang melalui bantuan ODA. Jepang telah mendukung pembangunan lingkungan hidup negara-negara berkembang di kawasan Asia, dengan memberikan pelatihan kepada 10.500 orang dan pinjaman ODA sebesar US\$ 900 juta. Bantuan ODA yang diberikan dalam bidang lingkungan hidup untuk kawasan Asia menempatkan Jepang pada angka pertama negara dengan alokasi bantuan lingkungan hidup terbesar di dunia untuk kawasan Asia (www.stats.oecd.org).

Sikap ekosentris Jepang juga terlihat dari upaya Jepang dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup global. Sejak tahun 1990, Jepang telah berupaya untuk

menjadi pemimpin dalam mengatasi permasalahan lingkungan global (www.indonesianembassy.go.jp). Peran Jepang sebagai negara ekosentris ditunjukkan dengan kontribusi yang aktif dalam agenda lingkungan hidup dunia. Jepang secara aktif telah menjadi tuan rumah beberapa konferensi lingkungan internasional seperti *Third Session of the Conference of Parties (COP-3) of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)* pada Desember 1997 yang menghasilkan Protokol Kyoto. Pada saat itu Jepang memiliki peran besar dalam Protokol Kyoto di mana Jepang melakukan lobi kepada negara-negara yang belum menjadi negara pihak untuk ikut serta bergabung dalam Protokol Kyoto. Tidak hanya itu, Jepang juga berusaha mengajak negara-negara maju untuk melakukan pendampingan terhadap negara berkembang dalam mengatasi permasalahan lingkungan mereka sebagai dampak dari proses pembangunan dalam negerinya (www.japan.kantei.go.jp). Selain UNFCCC Conference, secara spesifik dalam bidang kehutanan Jepang juga telah menjadi tuan rumah *International Expert Meeting on "Monitoring, Assessment and Reporting on the Progress towards Sustainable Forest Management"* (www.mofa.go.jp). Dengan mengadakan pertemuan tersebut Jepang turut menjadi pemimpin bagi upaya pelestarian hutan global, khususnya dalam mempromosikan *Sustainable Forest Management*.

Dengan melihat upaya kontribusi Jepang di atas, diakui bahwa Jepang telah melakukan tindakan kongkret dalam menanggapi masalah-masalah lingkungan global, dan mengambil peran sebagai negara yang memiliki konsentrasi penuh terhadap kelestarian lingkungan hidup dunia sebagai perwujudan dari identitasnya sebagai negara ekosentris.

Selaras dengan komitmen Jepang terhadap upaya penanganan permasalahan lingkungan hidup global tersebut, komitmen yang dilakukan Jepang dalam kerangka kerjasama AFP untuk memberantas mata rantai *illegal logging* dinilai juga merupakan perwujudan adanya identitas Jepang sebagai negara ekosentris. Identitas Jepang sebagai negara ekosentris yang kemudian memunculkan rasa tanggung jawab Jepang untuk turut mengatasi permasalahan *illegal logging* di Indonesia dengan membentuk kerangka kerjasama AFP.

Dalam kerangka kerjasama AFP, Jepang merupakan mitra utama sekaligus negara pendonor dalam kerjasama ini. Sementara itu, Indonesia merupakan salah satu negara yang termasuk dalam kawasan regional Asia dimana kondisi hutannya yang tinggi akan kasus *illegal logging* kemudian menjadi target program AFP. Dari sini, terlihat adanya keselarasan mitra antara Jepang dan Indonesia, mengingat Jepang merupakan negara yang peduli terhadap isu kehutanan global dan Indonesia merupakan negara yang memiliki hutan yang luas serta mengalami kendala dalam penyelesaian masalah deforestasi yang diakibatkan oleh tindak *illegal logging*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Osamu Ishiuchi, Atase bidang Kehutanan dan Perubahan Iklim Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, bahwa kerjasama melalui skema AFP ini dilakukan oleh Jepang terhadap Indonesia dikarenakan sudah lama Jepang berkontribusi dalam bidang lingkungan dan kehutanan. Jika dikaitkan dengan apa yang telah diuraikan dalam sub-bab sebelumnya mengenai latar belakang kedekatan Jepang terhadap lingkungan, maka dapat dikatakan bahwa maksud 'sudah lama' di sini adalah Jepang telah menerapkan prinsip ekosentrisme, karena budaya yang telah mengakar mengenai kecintaan terhadap lingkungan, demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kemerosotan lingkungan dan implikasinya mengglobal.

Selain itu, Ishiuchi (2016) menyatakan bahwa hutan hujan tropis merupakan hal yang 'indah dan penting': "*Before forming the Asia Forest Partnership, Japan had worked hard to set up the global system for conservation of and sustainable use of the beautiful and important rain forest.*"

Pernyataan tersebut menguatkan identitas Jepang sebagai negara ekosentris yang sudah melekat dalam Jepang. Pemerintah Jepang selalu berusaha melakukan konservasi hutan, karena menganggap hutan terutama hutan hujan tropis adalah indah dan perlu dilestarikan mengingat hutan sangat penting untuk kehidupan di muka bumi.

Menyadari akan pentingnya hutan bagi kelangsungan hidup makhluk hidup hingga generasi penerus, Jepang telah mengukuhkan diri untuk berkomitmen dalam membantu negara yang mengalami deforestasi dan degradasi hutan. *Illegal logging* sebagai salah satu faktor penyumbang deforestasi dan degradasi hutan, membuat penanganan *illegal logging* di Indonesia menjadi suatu hal yang diperhatikan oleh Jepang.

Ishiuchi (2016) menyebutkan bahwa Jepang merupakan salah satu negara pengimpor kayu terbesar di dunia, dan 50% pasokan kayu yang didapat dari Indonesia adalah kayu ilegal. Menyadari akan keterlibatannya dalam rantai permasalahan *illegal logging* di Indonesia kemudian memunculkan pemikiran bahwa menyelamatkan hutan Indonesia merupakan hal yang wajar untuk dilakukan, juga merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah Jepang. Hal ini kemudian membentuk inisiatif Jepang untuk mengadopsi langkah-langkah yang dapat mengurangi kemungkinan masuknya produk kayu ilegal ke pasar domestik guna membantu memutus mata rantai *illegal logging*. Oleh sebab itu, kerjasama antara Pemerintah Jepang dengan Pemerintah Indonesia di bawah kerangka AFP terhadap penanganan *illegal logging* yang menjadi salah satu penyebab utama terjadinya deforestasi dan degradasi hutan terjadi.

Dalam paradigma konstruktivisme, memaknai tindakan sebuah negara secara sederhana dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu tindakan berdasarkan logika kepantasan (*logic of appropriateness*) dan tindakan yang berdasarkan logika untung-rugi (*logic of consequences*). Jika mengacu pada pernyataan Ishiuchi maka dapat dikatakan bahwa tindakan Jepang dalam komitmennya membantu permasalahan *illegal logging* di Indonesia dalam kerangka AFP tersebut didasari oleh logika kepantasan. Hal ini dibuktikan dari fluktuasi perdagangan kedua negara pada tahun 2002 – 2012 yang mengalami penurunan, khususnya di komoditi utama seperti kayu lapis (www.bps.go.id). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kerjasama penanganan *illegal logging* dalam skema AFP tersebut tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kenaikan total perdagangan di antara kedua negara.

Selain itu, dalam kerjasama AFP, bentuk komitmen Jepang dalam penanganan *illegal logging* di Indonesia adalah dengan memberikan beberapa bantuan seperti *technical assistance* dan finansial. Berdasarkan hasil wawancara dengan Teguh Rahardja, Kepala Bagian Kerjasama Multilateral Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia (2016), mengatakan:

“Bantuan yang diberikan oleh pemerintah Jepang dalam skema AFP merupakan bantuan yang bersifat hibah langsung. Dimana bantuan tersebut, khususnya bantuan finansial diberikan pada tahap awal kerjasama dan tidak diberlakukan syarat timbal balik dalam prosesnya.”

Hal ini menunjukkan bahwa komitmen Jepang dalam membantu permasalahan *illegal logging* di Indonesia bukan merupakan upaya pemenuhan keuntungan materi Jepang. Berdasarkan beberapa pertimbangan yang dikemukakan tersebut, maka dapat diperoleh simpulan bahwa data ataupun fakta mengenai komitmen kerjasama Jepang terhadap penanganan *illegal logging* di Indonesia dalam kerangka AFP menempatkan kepentingan Jepang berdasarkan logika kepantasan.

Kesimpulan

Dalam melakukan kerjasama yang bersifat bilateral maupun internasional, negara tidak selalu bertindak berdasarkan pertimbangan untung-rugi, ataupun melakukan kerjasama berdasarkan pemenuhan kepentingan ekonomi semata. Jepang merupakan salah satu contoh negara yang melakukan kerjasama bilateral ataupun internasional berdasarkan logika kepantasan (*logic of appropriateness*), dikarenakan kerjasama merupakan suatu hal yang sudah sepatutnya dilakukan. Hal tersebut tercermin dari komitmen Jepang untuk melakukan kerjasama lingkungan hidup dalam penanganan isu *illegal logging* di Indonesia di bawah kerangka kerjasama AFP.

Tindakan Jepang yang berdasarkan logika kepantasan tersebut merupakan cerminan dari identitas Jepang sebagai negara ekosentrisme, baik di dalam maupun luar negerinya. Oleh karena itu, pemenuhan identitas tersebut merupakan faktor utama yang mendasari komitmen Jepang terhadap permasalahan *illegal logging* di Indonesia di bawah kerangka kerjasama AFP.

Sebagai bagian dalam masyarakat internasional, Jepang turut mengambil bagian sebagai *role leader* bagi negara lain dalam upaya menyelesaikan berbagai masalah internasional, seperti masalah lingkungan yang berimplikasi terhadap perubahan iklim. Jepang melakukan tindakan tersebut didasarkan pada apa yang dianggap pantas dan tidak pantas ini tergantung dari perspektif aktor dalam menanggapi. Di sinilah paradigma selain konstruktivis, tidak dapat menjelaskan secara lebih rinci mengenai pemahaman tindakan suatu negara. Hal tersebut disebabkan oleh perspektif aktor terhadap sesuatu, tentunya berbeda dengan perspektif lain. Oleh karenanya, turut memberikan kontribusi terhadap penanganan permasalahan *illegal logging* di Indonesia dan tunduk terhadap norma domestik Shinto mengenai solidaritas untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup menjadi perspektif tersendiri bagi Jepang, yang tentu saja hal ini memang menjadi sesuatu yang pantas untuk dilakukan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan komitmen pemerintah Jepang terhadap penanganan permasalahan *illegal logging* di Indonesia di bawah kerangka kerjasama AFP adalah karena masalah *illegal logging* yang menyebabkan tingginya laju deforestasi dan degradasi hutan Indonesia telah berimplikasi secara global. Selain itu, pengadopsian Norma Shinto yang telah menciptakan nilai kepedulian terhadap hutan menjadi alasan utama terlaksananya kerjasama tersebut. Oleh karenanya, membantu Indonesia merupakan pemenuhan identitas Jepang sebagai bagian dari komunitas internasional dalam menciptakan tatanan internasional yang lebih baik dalam isu lingkungan hidup.

Referensi

- Bambang, Soepijanto. (2012). *Buku Statistik Kehutanan Indonesia Tahun 2008-2011*. Jakarta: Departemen Kehutanan.
- Rosyidin, Mohamad. (2015). *The Power of Ideas: Konstruktivisme dalam Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kagawa-Fox, Midori. (2010). *Environmental Ethics form the Japanese Perspective*. *Ethics, Place and Environment* 13 (1): 57-73
- Lawson. Sam. (2014). *Consumer Goods and Deforestation. An Analysis of the Extent and Nature of Illegality in Forest Conversion for Agriculture and Timber Plantations*. *Forest Trends*.
- Matsuoka, Shunji. (2014). *Japan's Asian Strategy: Japan's Asian Environmental Strategy and Soft Power of the 21st Century*. Policy Research Institute, Ministry of Finance, Japan, *Public Policy Review*. Vol 10. No 1. Maret 2014, hal 189.

- An Independent Assessment of Phase I of the Asia Forest Partnership and Suggestions for Enhancing Success in Phase II (2007). *Final Report for the AFP Steering Committee and the Evaluation Working Group*. AFP Secretariat.
- Asia Forest Partnership Phase 1 Assessment and Recommendations for Phase 2 (2007). *Final Report: AFP Evaluation Working Group*.
- Combating Illegal Logging in Asia; A Review of Progress and the Role of the Asia Forest Partnership 2002 – 2012 (2013). *Final Report*. AFP Secretariat and Ministry of Foreign Affairs, Japan.
- Osamu Isiuchi. (26 Mei 2016). *Atase Bidang Kehutanan dan Perubahan Iklim*, Kedutaan Besar Jepang, di Jakarta.
- Teguh Rahardja. (26 Desember 2016). *Kepala Bagian Kerjasama Multilateral Biro Kerjasama Luar Negeri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia*, di Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2014). *Nilai Ekspor Kayu Lapis Menurut Negara Tujuan Utama*, Web site: <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1022> diakses pada 27 November 2016.
- Chatham House. (2014). *Illegal Logging and Related Trade the Response in Indonesia*, Web site: https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/field/field_document/20141029IllegalLoggingIndonesiaHoareWellesleyFinal.pdf diakses pada 11 Januari 2016
- Chatham House. (2014). *Trade in Illegal Timber The Response in Japan*, Web site: <https://www.chathamhouse.org/publications/trade-illegal-timber-response-japan>. diakses pada 4 Maret 2016
- Forest Watch Indonesia.(2014). *Potret Keadaan Hutan Indonesia 2009-2013*. Web site: www.forestwatchindonesia.org diakses pada 5 Maret 2016
- Goho Wood. (2006). *Japanese Governments Procurement Policy*, Web site: <http://www.goho-wood.jp/world/index.html> diakses pada 18 Agustus 2016
- Greenpeace. (2010). *Melindungi Hutan Alam Terakhir – Hutan dan Perubahan Iklim*. Web site: <http://www.greenpeace.org/seasia/id/campaigns/melindungi-hutan-alam-terakhir/hutan-danperubahan-iklim/> diakses pada 5 Maret 2016
- Japan Kantei. (1997). *Opening Statement by Prime Minister Ryutaro Hashimoto*, Web site: <http://japan.kantei.go.jp/971210kyoto.html> diakses pada 5 Oktober 2016
- Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia. (nd.). *Indonesia-Jepang Jalin Kerjasama Bidang Kehutanan*, Web site: <http://www.menlh.go.id/indonesia-jepang-jalin-kerjasama-bidang-kehutanan/> diakses pada 14 Februari 2016
- Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries. (2007). <http://www.rinya.maff.go.jp/policy2/ihou/gaidoraintop.html> diakses pada 5 November 2016
- Ministry of Foreign Affairs Japan. (2003). *Speech by Mr. Mutsuyoshi Nishimura Ambassador for Global Environment*, Web site: <http://www.mofa.go.jp/policy/environment/wwf/speech0302.html> diakses pada 2 Oktober 2016
- Ministry of Foreign Affairs Japan. (nd.). *1998 Diplomatic Book*, Web site: <http://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/1998/index.html> diakses pada 24 Oktober 2016
- Ministry of Foreign Affairs Japan. (nd.). *Japan's Efforts on Global Issues and International Cooperation*, Web site: http://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/2009/html/h3/h3_02.html diakses pada 12 September 2016

- OECD. (2016). *Creditor Reporting System; Japan's ODA for Environment*, Web site: <http://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=CRS1> diakses pada 29 September 2016
- Rots, P. Aike. (2015). *Sacred Forest, Sacred Nation: The Shinto Environmentalist Paradigm and the Rediscovery of Chinju no Mori*. Japanese Jurnal of Religious Studies. Vol.42 No.2. Diterbitkan oleh Nanzan Institute for Religion and Culture. 2015. Hal 205-233
- Rots, P. Aike. (2013). *Forest of The Gods: Shinto, Nature, and Sacred Space in Contemporary Japan*, Web site: <https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/39760/dravhandling-rots.pdf?sequence=1> diakses pada 12 September 2016
- Rots, P. Aike. (2015). *Sacred Forest, Sacred Nations*, Web site: <https://nirc.nanzan-u.ac.jp/nfile/4455> diakses pada 12 Oktober 2016
- Shaw, Daniel M. P. (2009). *The Way Forward? Shinto and a Twenty- First Century Japanese Ecological Attitude : Nature, Space and the Sacred: Transdisciplinary Perspective*, Web site: <http://www.lancaster.ac.uk/users/philosophy/awaymave/onlineresources/diss05/danielshaw.pdf> diakses pada 12 September 2016